

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	i
KATA PENGANTAR	ii
BAB I KINERJA	1
A. Kinerja Program dan Kegiatan Substansial	1
BAB II PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT	7
A. Kendala dan Permasalahan	7
B. Tindak Lanjut Penyelesaian.....	7
BAB III PENUTUP	9

KATA PENGANTAR

Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, maka Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah menyusun Laporan Kinerja Triwulan II Tahun Anggaran 2019 yang berdasarkan pada Perjanjian Kinerja yang mengacu pada Rencana Strategis PD Tahun 2016-2021.

Penyusunan laporan kinerja ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan.

Hasil capaian kinerja sasaran secara umum masih belum optimal berdasarkan pengukuran capaian kinerja dan target pada triwulan II, yang tertuang dalam rencana aksi pelaksanaan kinerja. Tingkat pencapaian sasaran dan tujuan serta hasil yang diperoleh berorientasi pada pencapaian visi dan misi. Capaian pada triwulan II merupakan tolok ukur dalam pencapaian kinerja pada triwulan selanjutnya. Masih terdapat banyak kelemahan yang harus dibenahi dalam upaya mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Akhirnya melalui Laporan Kinerja pada Triwulan II Tahun 2019 ini, kita harapkan agar terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja khususnya seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun-tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Palangka Raya, 4 Juli 2019

**KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001

BAB I
KINERJA

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan II tahun 2019 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2019 Triwulan I serta realisasinya.

Tingkat capaian masing-masing sasaran ditentukan oleh realisasi dari target masing-masing indikator kinerja dengan membandingkan nilai keseluruhan masing-masing indikator kinerja dengan jumlah indikator yang ada pada setiap sasaran. Tingkat capaian masing-masing sasaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Tingkat Capaian (%)
1	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	75
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	13,34
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	69,64
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	100
5	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	0,30
6	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	14
7	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	0,63
8	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	B
9	Menurunnya angka kelahiran	1,85
10	Meningkatnya akseptor KB	95,68
11	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	59,30

Tingkat capaian indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan II tahun 2019 berdasarkan hasil pengukurannya dapat dilihat pada tabel berikut sebagai berikut :

Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target Capaian Triwulan II			Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	Persen	1,28	0,96	75	
Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislative	Persen	28,89	26,67	100	
	Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	persen	33,36	0	0	
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	rasio	0,0244	69,64	100	
Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	persen	25	19	100	
Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	persen	35,71	0	0	
	Rasio anak korban kekerasan	rasio	0,0244	0,6034	35,30	
Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	persen	25	7	14	
Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	persen	11,11	7	0,63	
Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	skor	B+	B	B	
Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	Total Fertility Rate (TFR)	2,28	2,29	103,9	

Sasaran	Indikator kinerja	Satuan	Target Capaian Triwulan II			Ket
			Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Rata-rata jumlah anak per Keluarga	anak	1	1,40	85,48	
Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	rasio	0,815	0,771	95,68	
Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan berkontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	persen	18,51	12,8	59,30	

Program dan Kegiatan

Program pada dasarnya merupakan kumpulan kegiatan yang dihimpun dalam satu kelompok yang sama secara sendiri maupun bersama-sama untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program merupakan alat bagi pencapaian tujuan dan sasaran. Penetapan program dilakukan dengan melihat kebijakan, tujuan, sasaran, visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan urusan wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana, dan Program/kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			2.428.675.000
1		Penyediaan jasa surat menyurat	12	7.000.000
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12	148.816.000
3		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12	130.946.000
4		Penyediaan jasa administrasi keuangan	12	906.674.000
5		Penyediaan jasa kebersihan kantor	12	34.156.000
6		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	12	20.000.000
7		Penyediaan alat tulis kantor	12	50.000.000
8		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	45.000.000
9		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12	50.000.000

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
10		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	1	196.130.000
11		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12	91.780.000
12		Penyediaan makanan dan minuman	12	30.000.000
13		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	12	406.298.000
14		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	12	311.875.000
II	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			2.689.254.000
1		Pembangunan gedung kantor	1	2.013.000.000
2		Pengadaan mobil jabatan	1	461.000.000
3		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	2	54.000.000
4		Pengadaan Meubelair	1	64.000.000
5		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1	30.000.000
6		Pemeliharaan rutin/berkala pagar, halaman dan tempat parkir	1	47.254.000
7		Penataan Taman dan Kebersihan Serta Kebun Hortikultura	1	20.000.000
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			127.775.000
1		Pengadaan Pakaian olahraga	78	53.650.000
2		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	78	74.125.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur			78.167.000
1		Pendidikan dan pelatihan formal	12	46.167.000
2		Rapat koordinasi perencanaan	3	32.000.000
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		1	360.265.000
1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1	9.204.000
2		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	1	9.561.000
3		Penyusunan RKA-SKPD	2	18.250.000
4		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	12	130.000.000
5		Penyusunan renja SKPD	2	18.250.000
6		Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	1	175.000.000
VI	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah			22.650.000
1		Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	12	22.650.000
VII	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan			1.648.890.900
1		Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	1	200.000.000

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
2		Rakor Pokja PUG Kab./Kota se-Kalteng	1	175.000.000
3		Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjabat PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	1	130.379.500
4		Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	1	300.000.000
5		Rakornas Forum Anak Nasional	1	300.000.000
6		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	1	105.504.150
7		Rapat Koordinasi Pokjabat Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi, Kabupaten dan Kota	1	57.971.250
8		Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota	1	160.036.000
9		Monev PUG di Daerah	1	120.000.000
10		Penyuluhan Tentang Perlindungan Anak dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	1	100.000.000
VIII	Program Keluarga Berencana			518.765.500
1		Pelayanan KIE	1	75.000.000
2		Promosi Kepedulian KB	30	64.200.000
3		Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se-Kalimantan Tengah	1	55.365.500
4		Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	35.000.000
5		Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	1	75.000.000
6		Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	12	150.000.000
7		Pembinaan Ketahanan Keluarga pada Kegiatan Momentum Keluarga Berencana	30	64.200.000
IX	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			111.199.000
1		Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	1	54.199.000
2		Pemantapan Jejaring Kelembagaan	1	57.000.000
X	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan			874.645.100
1		Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	5	250.000.000
2		Capacity Building/Seminar Motivasi Diri Bagi Perempuan	2	100.000.000

No	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
3		Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	12	327.384.400
5		Sosialisasi Advokasi Layanan P2TP2A	100	96.925.000
6		Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	4	40.335.700
7		Pembinaan Terhadap Posyandu Melalui Penguatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	1	60.000.000
XI	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan			475.000.000
1		Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	2	230.000.000
2		Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	1	150.000.000
3		Capacity Building Bagi Perempuan	50	50.000.000
4		Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	30	45.000.000
XII	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak			436.654.000
1		Seminar dan Penyuluhan tentang Pola Asuh Anak dan Remaja dalam Keluarga	1	157.000.000
2		Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	1	50.000.000
3		Pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	12	229.654.000
XIII	Program Penyusunan Profil Lembaga			369.643.000
1		Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	2	31.549.700
2		Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	1	113.093.300
3		Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	12	100.000.000
4		Pengembangan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	12	125.000.000
XIV	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS			168.416.500
1		Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	400	168.416.500
Jumlah				10.310.000.000

BAB II

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kendala dan Permasalahan

Beberapa kendala yang secara umum mempengaruhi capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan triwulan II adalah :

- a. Perubahan Nomenklatur dari Badan Menjadi Dinas menuntut penyesuaian baik dari sisi perencanaan penganggaran hingga tahap pelaksanaan dan evaluasi.
- b. Masih bergabungnya tenaga pelayanan dan manajemen pada administrasi bidang Perlindungan Perempuan dan Kualitas Keluarga dan tenaga pada P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak) sehingga pelayanan kurang maksimal.
- c. Pemahaman aparatur pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah terkait tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan keluarga berencana belum menyeluruh
- d. Belum adanya SOP yang baku dan terukur yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas
- e. Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.
- f. Kurangnya inovasi dalam penerapan, rencana kebijakan dan tindak lanjut kebijakan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- g. Bidang teknis belum memiliki rencana aksi kinerja triwulan, tahunan dan perperiode Renstra atau dokumen perencanaan yang komprehensif.
- h. Belum optimalnya koordinasi internal Perangkat Daerah terkait pencapaian kinerja.

B. Tindak Lanjut Penyelesaian

Beberapa tindak lanjut yang dapat diterapkan guna meminimalisir rendahnya capaian kinerja berdasarkan kendala-kendala yang dihadapi antara lain :

- a. Perlu dibentuknya UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai fungsi pelayanan kepada masyarakat.
- b. Perlu diimplementasikan target kinerja yang terdapat dalam perjanjian kinerja secara berjenjang sampai ditingkat eselon III dan IV

- c. Pergub 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang memuat tugas pokok fungsi PD, dapat dijadikan acuan dalam menyusun SOP guna mendukung pelayanan.
- d. Dilakukan reviu terhadap kinerja masing-masing bidang pelayanan menyangkut capaian program (*outcome*), kegiatan (*output*) yang dituangkan kedalam satu bentuk dokumen
- e. Membuat rencana aksi yang merupakan penjabaran target-target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja ke dalam periode bulan/triwulan/semesteran dan monitoring pencapaiannya
- f. Perlu dilakukan pengembangan kompetensi aparatur melalui diklat-diklat dan pelatihan teknis, memperbanyak koordinasi baik vertikal dan sektoral terkait bidang layanan.
- g. Perlu adanya inovasi dan strategi dalam pencapaian target indicator Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III

PENUTUP

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah merupakan Instansi pemerintah yang diberi tugas, tanggung jawab dan amanah untuk melakukan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kependudukan dan keluarga berencana sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah serta Perda Nomor 4 tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2008 tentang Organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian rincian tugas, fungsi dan tata kerja diatur dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah berlandaskan pada tujuan, sasaran dan program kerja yang ditetapkan baik dalam RPJMD 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra PD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2016-2021, maupun Perjanjian Kinerja antara Gubernur Kalimantan Tengah dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah Tengah triwulan II tahun 2019 ini menyajikan capaian hasil baik yang mencapai target maupun yang mencapai target dalam capaian strategis yang ditunjukkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah memberi gambaran bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan dan Keluarga Berencana secara Keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur, masyarakat dan dunia usaha.

Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah triwulan II tahun 2019 disusun dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

Dari hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan, dapat dikemukakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah belum dapat dikatakan berhasil dalam pelaksanaan tugasnya.

Terkait beberapa kendala dan kekurangan dalam pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah maka beberapa rekomendasi yang dapat disarankan untuk ditindaklanjuti adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan anggaran perlu dilakukan secara lebih cermat dan revisi anggaran dan kegiatan dilakukan secara sangat selektif (hanya Program/Kegiatan terkait kinerja PD yang menjadi prioritas) sehingga tidak menghambat pelaksanaan program dan kegiatan.
2. Peningkatan dan pengembangan kapasitas SDM dilakukan lebih intensif melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan menyangkut Program kegiatan terkait kinerja.
3. Mengingat kurangnya data sektoral terkait Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah baik data primer maupun data sekunder maka perlu dilakukan inventarisasi dan survei data terkait kinerja PD terutama dari program kegiatan yang sudah dilaksanakan untuk mempermudah pengukuran hasil kinerja dan perencanaan kinerja kedepannya.
4. Pemenuhan terhadap sarana dan prasarana operasional perkantoran harus diprioritaskan. Untuk itu perlu adanya perencanaan terhadap pemenuhan kebutuhan fasilitas, sarana dan prasarana penunjang.

5. Perlu segera membentuk UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak di Provinsi Kalimantan Tengah sebagai fungsi pelayanan maksimal kepada masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah yang bertugas dalam mendorong terwujudnya pemberdayaan perempuan, kesetaraan dan keadilan gender (KKG), terlindunginya anak dan fungsi keluarga berencana memiliki fungsi bukan sebagai pelaksana, melainkan sebagai perumus kebijakan, koordinator pelaksanaan kebijakan, advokator, fasilitator, mediator, dan inisiator. Dalam mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Anak (PHA) di semua PD di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan lembaga masyarakat. Agar setiap PD dan lembaga masyarakat tersebut dapat mengimplementasikan strategi PUG dan PHA ke dalam setiap kebijakan, program dan kegiatannya yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasinya, maka tugas awal yang paling mendasar dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah. Dan dalam implementasinya mengubah *mindset* individu dan budaya lembaga dari buta dan bias gender menjadi sadar, sensitif, peduli, dan tanggap (responsif) gender, dan dari tidak peduli terhadap hak anak menjadi peduli anak.

Oleh karena itu, indikator outcome, terlebih lagi indikator dampak (*impact*) dari keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Tengah lebih dan tidak dapat diukur dalam jangka waktu yang relatif pendek (satu tahun). Dengan adanya visi dan misinya, maka keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah pada hakekatnya tersebar sebagai bagian dari keberhasilan semua Perangkat Daerah dan lembaga masyarakat dalam mengintegrasikan ataupun mempertimbangkan isu gender, perempuan dan anak ke dalam kebijakan, program, dan kegiatannya.

Kendati proses pencapaian tujuan dan penetapan ukuran keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah bersifat kompleks, cenderung bernuansa kualitatif, dan acapkali merupakan output dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*), bukan berarti kinerja PD ini tidak dapat diukur.

Melihat dari fungsi koordinasi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah, ada fungsi Pelayanan yang dilakukan yaitu pada perlindungan Perempuan dan anak, maka adanya pergersaran dari fungsi koordinasi menjadi fungsi pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat, sehingga perlunya promosi dan advokasi terhadap Pelayanan yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga berencana Provinsi Kalimantan Tengah.

A. LAPORAN KINERJA								
No	Sasaran	Indikator kinerja	Target	Satuan	Target Capaian Triwulan II			Ket
					Target	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Implementasi Pengarusutamaan Gender	Persentase ARG pada Belanja Langsung APBD Provinsi Kalteng	2,57	persen	1,28	0,96	75	
2	Meningkatnya peran perempuan dalam jabatan publik dan pendapatan keluarga	Persentase perempuan di lembaga legislative	28,89	persen	28,89	26,67	100	
		Persentase Sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga	33,36	persen	33,36	0	0	
3	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Rasio kekerasan terhadap perempuan	0,0213	rasio	0,0244	69,64	100	
4	Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO	Persentase perempuan korban kekerasan yang terlayani sesuai dengan standar	100	persen	25	19	100	
5	Berkurangnya kasus kekerasan terhadap anak	Persentase Kabupaten/Kota layak anak minimal kategori pratama	35,71	persen	35,71	0	0	
		Rasio anak korban kekerasan	0,0213	rasio	0,0244	0,6034	35,30	
6	Meningkatnya kualitas layanan perlindungan khusus kepada anak	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan sesuai standar	100	persen	25	7	14	
7	Meningkatnya kualitas data pilah gender dan anak	Persentase PD yang memiliki sistem data gender dan anak	11,11	persen	11,11	7	0,63	
8	Meningkatnya koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan program dan anggaran	Hasil Penilaian SAKIP	B+ / BB	skor	B+	B	B	

9	Menurunnya angka kelahiran	Angka kelahiran total per WUS	2,28	Total Fertility Rate (TFR) anak	2,28	2,29	103,9	
		Rata-rata jumlah anak per Keluarga	1		1	1,40	85,48	
10	Meningkatnya akseptor KB	Rasio pemakaian kontrasepsi	0,815	rasio	0,815	0,771	95,68	
11	Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan kontrasepsi yang tidak terpenuhi (unmet need)	18,51	persen	18,51	12,8	59,30	

B. LAPORAN KEUANGAN PENUNJANG KINERJA

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan TW II			Ket
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		2.428.675.000	526.532.400	970.533.843	39,96	
1		Penyediaan jasa surat menyurat	7.000.000	2.150.000	900.000	12,85	
2		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	148.816.000	47.510.000	38.813.061	26,08	
3		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	130.946.000	32.750.000	23.267.436	17,77	
4		Penyediaan jasa administrasi keuangan	906.674.000	230.055.500	351.844.477	38,81	
5		Penyediaan jasa kebersihan kantor	34.156.000	8.539.000	5.789.000	16,95	
6		Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	20.000.000	6.600.000	2.180.000	10,90	
7		Penyediaan alat tulis kantor	50.000.000	9.836.900	24.343.500	48,69	
8		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	45.000.000	14.592.000	12.194.000	27,10	
9		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	50.000.000	6.000.000	17.713.000	35,43	
10		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	196.130.000	0	196.100.000	99,98	
11		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	91.780.000	10.637.000	3.650.000	3,98	

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan TW II			Ket
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
12		Penyediaan makanan dan minuman	30.000.000	12.262.500	13.631.000	45,44	
13		Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	406.298.000	81.084.500	158.392.525	38,98	
14	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	311.875.000	64.515.000	121.715.844	39,03	
II			2.689.254.000	1.087.375.000	1.119.377.772	41,62	
1		Pembangunan gedung kantor	2.013.000.000	1.072.375.000,000	570.015.822	28,32	
2		Pengadaan mobil jabatan	461.000.000	0	439.523.650	95,34	
3		Pengadaan kendaraan dinas/operasional	54.000.000	0	46.179.650	85,52	
4		Pengadaan Meubelair	64.000.000	0	63.658.650	99,47	
5		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000	10.000.000	0	0	
6		Pemeliharaan rutin/berkala pagar,halaman dan tempat parkir	47.254.000	0	0	0	
7		Penataan Taman dan Kebersihan Serta Kebun Hortikultura	20.000.000	5.000.000	0	0	
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		127.775.000	1.000.000	0	0	
1		Pengadaan Pakaian olahraga	53.650.000	0	0	0	
2		Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	74.125.000	1.000.000	0	0	
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		78.167.000	25.083.000	45.360.273	58,03	
1		Pendidikan dan pelatihan formal	46.167.000	14.417.000	35.226.173	76,30	
2		Rapat koordinasi perencanaan	32.000.000	10.666.000	10.134.100	131,67	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		360.265.000	66.742.800	216.794.300	60,18	

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan TW II			Ket
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
1		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	9.204.000	0	9.204.000	100,00	
2		Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	9.561.000	0	9.276.100	97,02	
3		Penyusunan RKA-SKPD	18.250.000	0	0	0	
4		Monitoring, evaluasi dan pelaporan	130.000.000	36.408.000	64.183.000	49,37	
5		Penyusunan renja SKPD	18.250.000	18.250.000	9.291.500	50,91	
6		Rapat Koordinasi Perencanaan dan Rapat Evaluasi dengan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah	175.000.000	12.084.500	124.839.700	71,34	
VI	Program Peningkatan Pengembangan Pengelolaan Aset/Barang Daerah		22.650.000	0	0	0	
1		Pengelolaan Inventaris Barang Daerah	22.650.000	0	0	0	
VII	Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan Perempuan		1.648.890.900	752.546.150	377.542.660	22,90	
1		Rakorda pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak	200.000.000	200.000.000	0	0	
2		Rakor Pokja PUG Kab./Kota se-Kalteng	175.000.000	0	0	0	
3		Rapat Koordinasi P2TP2A/Pokjabab PkdRT Prov/Kab/Kota se-Kalteng	130.379.500	130.379.500	112.682.610	86,43	
4		Rapat Koordinasi Forum Anak Provinsi	300.000.000	300.000.000	133.210.000	44,40	
5		Rakornas Forum Anak Nasional	300.000.000	0	0	0	
6		Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu	105.504.150	22.166.650	5.480.000	5,19	

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan TW II			Ket
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
7		Rapat Koordinasi Pokjatap Gerakan Sayang Ibu (GSI) Provinsi,Kabupaten dan Kota	57.971.250	0	57.273.250	98,80	
8		Rapat Koordinasi Forum data Terpilah Gender dan Anak Tingkat Kab./Kota	160.036.000	0	0	0	
9		Monev PUG di Daerah	120.000.000	0	68.896.800	57,61	
10		Penyuluhan Tentang Perlindungan Anak dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak	100.000.000	18.250.000	0	0	
VIII	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		111.199.000	25.432.500	54.199.000	48,74	
1		Penyusunan Anggaran Responsif Gender (ARG)	54.199.000	0	54.199.000	100,00	
2		Pemantapan Jejaring Kelembagaan	57.000.000	25.432.500	0	0	
IX	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		874.645.100	398.056.200	224.995.370	25,72	
1		Peningkatan Peran dan kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) Provinsi Kalteng	250.000.000	99.253.800	60.691.020	24,28	
2		Capacity Building/Seminar Motivasi Diri Bagi Perempuan	100.000.000	100.000.000	50.989.250	50,99	
3		Pengembangan Sistem Administrasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2)	327.384.400	79.146.000	113.315.100	34,61	
5		Sosialisasi Advokasi Layanan P2TP2A	96.925.000	96.925.000	0	0	
6		Promosi Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	40.335.700	0	0	0	
7		Pembinaan Terhadap Posyandu Melalui Penguatan Gerakan Sayang Ibu (GSI)	60.000.000	22.731.400	0	0	

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan TW II			Ket
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
X	Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		475.000.000	146.140.000	210.844.400	44,39	
1		Pameran dan pawai pembangunan dalam rangka pembangunan pemberdayaan perempuan	230.000.000	146.140.000	165.022.300	71,75	
2		Promosi Peningkatan Peran Serta Perempuan Dalam Pembangunan	150.000.000	0	0	0	
3		Capacity Building Bagi Perempuan	50.000.000	0	45.822.100	91,64	
4		Peningkatan Kelompok Usaha Perempuan	45.000.000	0	0	0	
XI	Program Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Anak		436.654.000	74.900.750	103.811.800	23,77	
1		Seminar dan Penyuluhan tentang Pola Asuh Anak dan Remaja dalam Keluarga	157.000.000	0	0	0	
2		Monitoring Evaluasi Pencapaian dan Pelaksanaan KLA	50.000.000	17.300.750	0	0	
3		Pembinaan dan Bimbingan Pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak	229.654.000	57.600.000	103.811.800	45,20	
XII	Program Penyusunan Profil Lembaga		369.643.000	95.726.600	0	0	
1		Pengembangan Sistem Informasi Data Terpilah Gender dan Anak	31.549.700	31.549.700	0	0	
2		Penyusunan Buku Data Terpilah Gender dan Anak	113.093.300	0	0	0	
3		Publikasi dan Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik	100.000.000	56.091.400	0	0	
4		Pengembangan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)	125.000.000	8.085.500	0	0	
XIII	Program Keluarga Berencana		518.765.500	194.677.000	210.135.750	40,51	
1		Pelayanan KIE	75.000.000	0	74.798.250	99,73	
2		Promosi Kepedulian KB	64.200.000	42.000.000	0	0	

No	Program	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan TW II			Ket
				Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8
3		Promosi Upaya Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pengaturan Kelahiran Pada Masyarakat Kab./Kota se-Kalimantan Tengah	55.365.500	0	54.663.500	98,73	
4		Konsultasi/Koordinasi ke Pusat dan Daerah Tentang Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	35.000.000	35.000.000	0	0	
5		Sinkronisasi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk	75.000.000	0	0	0	
6		Monev Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	150.000.000	53.477.000	39.470.000	26,31	
7	Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Pembinaan Ketahanan Keluarga pada Kegiatan Momentum Keluarga Berencana	64.200.000	64.200.000	41.204.000	64,18	
XIV			168.416.500	0	37.365.800	22,19	
1		Penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah	168.416.500	0	37.365.800	22,19	

Palangka Raya, 4 Juli 2019

KEPALA DINAS P3APPKB
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

dr. ADM. TANGKUDUNG, M.Kes
Pembina Utama Madya
NIP. 19630527 199102 1 001